



Dilema Efisiensi Anggaran Membelit DIY

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpotensi terkena dampak berlapis dari kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah. Mitigasi perlu disiapkan.

Mohamad Final Daeng

Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 memunculkan dilema. Di satu sisi, hal ini menghemat keuangan negara sekaligus mencegah pemborosan. Namun, bagi daerah tertentu, kebijakan ini akan memukul sektor-sektor ekonomi yang selama ini bergantung pada pos belanja yang dipangkas.

Salah satu daerah yang beresiko mengalami dampak berlapis efisiensi-anggaran itu adalah Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi itu, terutama Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagai wilayah aglomerasi, dikenal sebagai pusat kegiatan pertemuan, insentif, konvensi/konferensi, dan pameran atau MICE.

Bukan hanya di regional DIY-Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sleman kerap menjadi tujuan rapat, pertemuan, konferensi, dan seminar dari kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan tingkat pusat. Level acaranya pun bermacam-macam, mulai dari lingkup rapat koordinasi kabupaten/kota atau provinsi, seminar nasional, hingga konferensi internasional.

Konektivitas penerbangan dengan banyak kota di Indonesia menjadi salah satu pendukung suburannya kegiatan MICE di DIY. Apalagi, lokasinya juga tak terlalu jauh dari Jakarta dan bisa dicapai dengan berbagai moda transportasi.

Selain itu, bonus yang tak dimiliki semua daerah adalah melimpahnya daya tarik pariwisata di satu kawasan yang relatif kecil. Hal ini seolah jadi "obat penawar" bagi rangkaian kegiatan rapat dan seminar yang menguras pikiran.

Karena itulah hampir semua hotel berbintang di Yogyakarta dan Sleman mendedikasikan banyak ruangan untuk memenuhi kebutuhan MICE tersebut. Ini termasuk aula-aula berukuran superjumbo dengan kapasitas ribuan orang.

Efektif industri MICE tak hanya dimknati hotel. Dampak-



Pelajar berwisata di kawasan Titik Nol, Yogyakarta, Kamis (6/2/2025). Kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas ke daerah dikhawatirkan oleh kalangan pelaku usaha perhotelan dan jasa pariwisata di Yogyakarta akan memberi dampak signifikan terhadap usaha mereka. Kunjungan wisata dari kalangan nongindas pun kini menjadi tumpuan utama pelaku industri wisata di Yogyakarta.

nya turut dirasakan berbagai usaha yang menunjang kegiatan tersebut, seperti penyedia katering, event organizer, jasa transportasi, penjual oleh-oleh, warung makan, serta berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya.

Namun, tahun ini, pun di-pundi rezeki dari kegiatan MICE di DIY dipastikan menyusut. Ini menyusut terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diterbitkan 22 Januari 2025.

Menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi sejumlah pengeluaran. Ini mencakup belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Adapun gubernur dan bupati/wali kota diminta mem-

batasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kaji-an, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion. Ada pula ketentuan untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

Reservasi batal

Dampaknya bagi sektor perhotelan di DIY pun langsung terasa. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono, Kamis (6/2/2025), mengungkapkan, hampir semua reservasi untuk kegiatan MICE pada Februari sampai Desember dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah dibatalkan. Deddy menyebut, kondisi itu mengancam keberlangsungan usaha perhotelan di DIY. Pasalnya, porsi kegiatan MICE mencakup 55-60 persen dari reservasi hotel, dengan

kegiatan MICE pemerintahan berkontribusi 40 persen dan sisa 15-20 persennya dari aktivitas MICE swasta.

Bagi hotel, MICE merupakan sumber pemasukan yang konstan sepanjang tahun, berbeda dengan wisatawan yang hanya ramai pada bulan-bulan tertentu atau pada musim liburan. "Ini sangat membantu hotel mengisi kekosongan saat low season," ujar Deddy.

Karena itu, ia mengungkapkan, hotel-hotel kini berupaya menggenjot promosi MICE ke sektor swasta untuk menutupi anjloknya kegiatan MICE pemerintah. Hal tersebut penting agar hotel tetap bisa hidup.

Namun, jika upaya itu tak membuahkan hasil dalam enam bulan, Deddy khawatir hotel terpaksa ikut melakukan efisiensi dengan memangkas karyawan. "Sebetulnya kami tak menginginkan itu terjadi. Itu pilihan terakhir untuk me-

nutup biaya operasional di tengah berkurangnya pemasukan," ucapnya.

Bagi pemerintah daerah, khususnya Pemda Provinsi DIY serta Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman, efeknya berlipat. Selain harus memangkas belanja APBD sesuai Inpres No 1/2025, Pemda DIY juga terimbas pemotongan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp 200 miliar menjadi Rp 1 triliun.

Tekanan terhadap industri perhotelan pun berpotensi membuat pemasukan daerah dari pajak hotel dan restoran tahun ini anjlok. Padahal, pajak hotel dan restoran merupakan salah satu elemen terbesar pajak daerah yang menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Kontribusi besar

Sebagai gambaran, berdasar-

kan data Kementerian Keuangan, PAD Kota Yogyakarta pada 2023 tercatat Rp 805 miliar dengan kontribusi pajak daerah sebesar Rp 552 miliar. Data itu tak merinci besaran pajak hotel dan restoran.

Namun, data Bappeda DIY pada tahun yang sama, pendapatan dari pajak hotel di Kota Yogyakarta diketahui sebanyak Rp 204 miliar dan pajak restoran sebesar Rp 85 miliar. Artinya, pajak hotel dan restoran menyumbang 52 persen pajak daerah dan 36 persen PAD Kota Yogyakarta.

Selain potensi berkurangnya pemasukan itu, pemda juga bersiap menghadapi masalah lain jika sampai nanti terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan. Ini berarti menambah angka pengangguran dan kemiskinan.

Saat ditanya pada Rabu (5/2), Sekretaris Daerah DIY Beni Suharsono mengakui,

belanja pemerintah yang dikurangi ini akan memengaruhi perekonomian DIY secara keseluruhan. Akan tetapi, seberapa besar dampak langsung ataupun tak langsungnya, Beni belum bisa memastikan. "Nanti kita lihat," ucapnya.

Namun, berkaca dari pengalaman saat pandemi Covid-19 yang kala itu juga berimbas pada pemangkasan anggaran, Beni menyiratkan harapan. Dia menyebut, ketangguhan dan daya tahan warga DIY luar biasa dalam melalui krisis.

Wali Kota terpilih Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan, saat menjabat nanti, dirinya akan berupaya menjaga PAD dari sektor pariwisata. "Strategi refocusing anggaran jangan sampai mengganggu PAD," katanya.

Menurut pengajar ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yudiantira Hendra Permana, pemangkasan anggaran pemerintah pasti berdampak terhadap perekonomian daerah, termasuk DIY. Pengetatan anggaran ini adalah "bom waktu" yang tak terhindarkan akibat tata kelola anggaran selama ini yang tidak baik.

Yudiantira memaparkan, hal paling terasa sebagai dampak efisiensi anggaran adalah melemahnya daya beli yang terlihat dari deflasi. Pada Januari 2025, Badan Pusat Statistik merilis deflasi bulan-ke-bulan sebesar 0,76 persen.

Hal yang dikhawatirkan adalah indikator kemiskinan dan pengangguran naik. Karena itu, dia berharap ada langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah untuk meredakan dampak tersebut. "Misalnya, mitigasi jangka pendek berupa bantuan sosial," katanya.

Terkait dampak efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan, Yudiantira menyebut, ini dipicu model usaha yang terlalu lama bergantung pada pengeluaran pemerintah. Namun, pada saatnya akan terjadi koreksi pada industri perhotelan dengan kondisi ini, hingga muncul kesetimbangan baru yang lebih berkelanjutan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005